

UPDATE STATUS BUMI

BASIS

meta-akta

A. SETYO WIBOWO

Pendidikan Karakter
à la Stoikisme

FRANZ MAGNIS-SUSENO

Membongkar
yang Ditutup-tutupi

SINDHUNATA

"Bung Karno,
Penggali Pancasila"
di Omah Petroek

"BUNG KARNO
PENGALU PANGALILAH", 2021
karya SUPRIADI-SATIAJI

Rp30.000,00

NOMOR 07 - 08 JUNI KE-72, 2023

SIUPP No. 213/SK/MENPEN/SIUPP/D.1/1986.
Jo Ditjen PPG
Nomor 32/Ditjen/PPG/K/1996, 27 Maret 1996
Penerbit

Yayasan BP Basis

Anggota SPS ISSN: 0005-6138

Penasihat

Franz Magnis-Suseno

Pemimpin Umum

Sindhunata

Pemimpin Redaksi

A. Setyo Wibowo

Wakil Pemimpin Redaksi

A. Sudiarja

Dewan Redaksi

B. Hari Juliwana

Heru Prakosa

A. Bagus Laksana

Redaktur Pelaksana

C. Bayu Risanto

Redaktur

Dian Vita Elyyati

Francisca Purnawijayanti

Redaktur Artistik

Hari Budiono

Sekretaris Redaksi

Anang Pramuriyanto

Promosi/ Iklan

Slamet Riyadi, A. Yulianto

Willy Putranta

Administrasi/ Distribusi

Maria Dwijayanti

Dokumentasi

Francisca Triharyanti

Kuangan

Ani Ratna Sari

Widarti

Alamat

Jl Pringgokusuman No. 35, Yogyakarta

Telepon: 081225225423, Faks: (0274) 546811

Surel administrasi/distribusi:

basis.adisi@gmail.com

Surel redaksi: majalahbasis@gmail.com

Rekening:

BCA No. 1263333300 a.n. Yay Basis,

BRI No. 0029-01-000113-56-8 a.n. Sindhunata

BNI No. 1952000512 a.n. Bpk Sindhunata



TANDA-TANDA ZAMAN / C. Bayu Risanto
Update Status Bumi ... 2

KACABENGKALA / A. Setyo Wibowo
Pendidikan Karakter à la Stoikisme ... 8

SOSIAL / Sindhunata
*"Bung Karno, Penggali Pancasila"
di Omah Petroek ... 28*

SOSIAL / Franz Magnis-Suseno
Membongkar yang Ditutup-tutupi ... 34

SOSIAL / Trisno S. Sutanto
Sengkarut Pendirian Rumah Ibadah ... 42

BUKU / Harry Cahyadi
Apresiasi atas "Illiad Homer" ... 45

SEJARAH / Riza Istanto
*Citra Kesatria Jawa Kuno dalam
Sastra Arjunawiwaha ... 49*

CERPEN / Dion Saka Bintang
Sampai ketika Seseorang Mati ... 55

LAPORAN / Dian Vita Elyyati
*Sekolah Basis 3.0 Rest Area bagi
Peziarah Tangguh ... 61*



Membongkar yang Ditutup-tutupi

FRANZ MAGNIS-SUSENO

Pada tanggal 19 Januari 2010, Pater Klaus Mertes, Rektor Kolese Kanisius, sekolah elite Yesuit di Berlin, menulis surat kepada 600 alumni. Dalam surat tersebut, ia meminta informasi apakah ada yang mengalami pelecehan seksual ketika bersekolah di Kolese Kanisius. Hasilnya mengejutkan. Ada 69 laporan tentang 72 kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh tiga imam dan seorang guru pada kurun waktu tahun 1960–2010.

Surat Pater Mertes itu membuka pintu air laporan pelecehan seksual dalam Gereja Katolik Jerman yang gelombangnya masih bergulir sampai sekarang. Serikat Jesus (Ordo Yesuit) Jerman, ordo-ordo lain, dan banyak keuskupan lainnya melakukan penelitian tentang pelecehan seksual dalam kalangan mereka. Pada tahun 2018, terbitlah "MHG Studie", suatu penelitian independen yang dipraksais. Konferensi Uskup Jerman. Hasilnya lagi-lagi amat mengejutkan: dalam rentang waktu 1945–2014, ditemukan ada 3.677 anak di bawah umur yang menjadi korban pelecehan seksual oleh aparat Gereja, yang kebanyakan adalah imam.

Tanda-tanda awal bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres dalam Gereja Katolik muncul pada tahun 1980-an. Media Amerika Serikat melaporkan adanya korban pelecehan seksual di bawah umur. Sebagai respons, pada tahun 1990-an, Konferensi Uskup Amerika Serikat, diikuti Konferensi Uskup Irlandia, menetapkan petunjuk-petunjuk lebih keras tentang cara menangani kasus-kasus pelecehan.

Lama-kelamaan menjadi jelas bahwa pelecehan seksual merupakan masalah serius dalam Gereja Katolik di berbagai kawasan. Tiga tahun lalu, sebuah komisi independen memperkirakan bahwa di Prancis, sejak tahun 1950-an, sekitar 216.000 anak di bawah umur menjadi korban dari sekitar 3.000 imam dan biarawan/biarawati. Penyelidikan di Belgia, Belanda, dan beberapa negara lain mendapat hasil serupa. Misalnya, pada tahun 2018, sebuah *grand jury* di Pennsylvania, Amerika Serikat, mengumumkan hasil penelitian resmi bahwa

selama 70 tahun 301 imam Katolik melakukan pelecehan seksual kepada lebih dari seribu anak, dan bahwa imam-imam itu secara rutin hanya dipindah-pindahkan dari paroki satu ke paroki yang lain untuk menghindari pemeriksaan polisi.

Bila awalnya perhatian diarahkan kepada anak di bawah umur, seiring waktu bergulir, disadari bahwa orang dewasa juga rentan, terutama mereka yang dalam posisi tidak mampu mandiri. Bahkan, suster atau biarawati juga menjadi korban. Dalam wawancara tahun 2019, Paus Fransiskus mengakui bahwa "ada pelecehan seksual terhadap suster dalam Gereja ... Saya tahu juga bahwa ada imam dan uskup yang melakukannya, dan saya kira, masih dilakukan". Yang menjadi kasus terkenal adalah kasus Uskup Jalandhar (India) Franco Mulakkal. Atas perintah suster atasannya, seorang suster melayani kebutuhan seksual uskup itu sebanyak tiga belas kali sepanjang tahun 2016–2017. Akhirnya, lima suster melawan perintah suster atasan mereka dan membawa kasus ini ke publik. Perkara hukum terhadap Mulakkal masih berlangsung. Latar belakang pelecehan terhadap suster adalah ketergantungan mereka pada para imam, terutama dalam pelayanan misa dan sakramen, yang melahirkan suatu "budaya" bahwa "suster melayani romo". Ditambah dengan kenyataan bahwa para suster pada umumnya miskin.

Reaksi Gereja

Begitu lama pelecehan seksual tidak dianggap serius. Kini, isu ini mulai mendapat perhatian khusus. Pada masanya, Paus Yohanes Paulus II juga mengabaikan hal ini. Waktu itu, tahun 1986, sesungguhnya sudah

ada desas-desus terkait pelecehan seksual, tapi ia tetap mengangkat Pater Hans Herrmann Groer menjadi Uskup Agung Wina dan dua tahun menjadi kardinal. Akhirnya, tahun 1995, Groer diberhentikan dari semua jabatan karena ketahuan melakukan pelecehan, antara lain terhadap mahasiswa seminarinya sendiri. Ada pula kasus Marciel Maciel, pendiri kongregasi *Legionnaires of Christ*. Meskipun sudah diperingatkan bahwa Maciel bermasalah, Paus Yohanes Paulus II tetap menjadikannya sebagai orang kepercayaan, karena dinilai sebagai Katolik tulen dan anti-Marxis. Akhirnya, baru Paus Benediktus XVI (Josef Ratzinger) yang memberhentikan Maciel dan menyuruhnya bertapa. Maciel meninggal tahun 2008. Sebagai Ketua Kongregasi Imam Vatikan yang mengurus kasus-kasus imam yang bermasalah, Ratzinger sudah tahu kenyataan mengemukakan ini. Sesudah menjadi Paus, Ratzinger mulai bertindak. Pada tahun 2008, ia menjadi Paus pertama yang bertemu dengan korban-korban pelecehan seksual.

Paus Fransiskus, Paus yang menjabat saat ini, akhirnya mengangkat kasus pelecehan seksual oleh klerus Gereja ke fokus perhatiannya. Beberapa kali ia bertemu dengan korban-korban pelecehan. Pada tahun 2018, sesudah menerima laporan sepanjang 2.300 halaman tentang pelecehan seksual di Gereja Chile (Amerika Selatan), Fransiskus memanggil semua uskup Chile (31 orang) ke Roma dan meminta mereka yang bermasalah mengajukan pengunduran diri. Hasilnya, enam uskup diberhentikan. Tahun 2019, Fransiskus bertemu dengan 600 uskup sedunia di Vatikan, dan kemudian menerbitkan *Motu proprio* (penetapan) "Vos estis lux mundi" ("Kalian adalah cahaya dunia"), yang menetapkan prosedur rinci untuk menangani dan melaporkan kasus-kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh uskup, imam, rohaniwan, rohaniwati, dan personal Gereja lain serta menegaskan tanggung jawab para atasan gerejawi.

Mengerikan dan memalukan

Mulanya, pelecehan seksual dianggap masalah khas dunia Barat yang "liberal". Namun, anggapan itu terbantah oleh fakta bahwa kasus pelecehan seksual yang terjadi di wilayah-wilayah yang tidak mengikuti budaya Barat, seperti di Polandia, Afrika, juga Indonesia, sama gawatnya. Orang yang betul-betul pedofil hanya bagian kecil dari semua pelaku. Kebanyakan kasus pelecehan dilakukan karena ada kesempatan, misalnya

murid di sekolah, mahasiswa, anak jalanan, orang miskin, atau bawahan. Dan hal itu menjadi semakin parah karena tidak ada tindakan tegas kepada pelaku sebagai konsekuensinya. Seorang rohaniwan bisa saja sangat mengesankan sebagai agamawan, tapi sekaligus secara rutin melakukan pelecehan seksual di luar radar perhatian umat.

Kita sekarang tahu bahwa pelecehan terhadap orang yang rentan dan anak di bawah umur merupakan masalah raksasa dalam masyarakat pada umumnya. Pelecehan seksual terjadi di dunia olahraga, bisnis pertunjukan, film dan sandiwar, lingkungan pendidikan, tahanan polisi, dan sebagainya. Pelecehan seksual paling banyak terjadi justru dalam lingkungan kekerabatan, misalnya oleh ayah, kakak, saudara, paman, bahkan kakek. Pemanfaatan posisi kuasa untuk melayani hasrat seksual terjadi di mana-mana. Pelecehan seksual ini mengerikan karena anak yang menjadi korban kemudian bisa terganggu perkembangan seksualitasnya sendiri, dan kemungkinan menjadi pelaku pelecehan lagi.

Persentase imam yang melakukan pelecehan memang jauh di bawah persentase pelecehan rata-rata dalam masyarakat. Charol Shakeshaft, penulis penelitian tentang pelecehan seksual pada sekolah-sekolah negeri di Amerika Serikat (*Has Media Ignored Sex Abuse In School?* CBS News, 24 Agustus 2006) memperkirakan bahwa kemungkinan seorang anak mengalami pelecehan di sekolah seratus kali lebih besar daripada mengalami pelecehan oleh imam Katolik. Akan tetapi, hal itu bukan alasan untuk "menerima begitu saja" pelecehan seksual yang dilakukan oleh imam, uskup, dan rohaniwan dalam Gereja Katolik – dan barangkali juga dalam agama-agama lain. Gereja bukan klub olahraga. Gereja mengklaim mempermalkumkan kehidupan yang suci, sesuai dengan kehendak serta diberkati oleh Allah. Para uskup, imam, dan rohaniwan terpancang memancarkan kehidupan dalam bimbingan oleh Roh Ilahi kepada umat. Para tertahbis dan rohaniwan mengucap janji selibat dan kaul keperawanan untuk seratus persen menyediakan diri kepada Tuhan dan membawa umat kepada-Nya. Lebih jauh lagi, Gereja Katolik mengajarkan etika seksual yang amat keras, yang dari umat menuntut penolakan terhadap segenap penyelewengan seksual. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang-orang Gereja mengkhianati panggilan rohani mereka dan menjadi sandungan berat bagi umat.

Mengatasi pelecehan seksual menjadi semakin urgen, karena para korbannya adalah justru mereka yang seharusnya dilindungi Gereja: orang rentan, lemah, orang muda, dan orang miskin. Ketika memercayakan anak-anaknya kepada para imam dan rohaniwan, para orangtua merasa anak-anaknya aman karena berada dalam perlindungan. Namun, sayang, justru anak-anak ini yang dilecehkan hingga mengalami trauma. Apalagi kalau, seperti disebutkan Kardinal Schönborn, si pelaku mengancam korbannya, bila mengadu kepada orang lain, ia akan masuk neraka. Para korban tidak hanya menderita karena dilecehkan, tapi juga karena mereka seakan-akan dipersalahkan. Karena itu, menurut Schönborn, penting sekali agar para korban mendapat "perhatian penuh dari Gereja dalam bentuk kejujuran dan kesediaan institusi dan aparatusnya untuk mendengarkan agar pengalaman pahit korban dapat divalidasi".

Pelecehan seksual oleh aparat Gereja ini memang membuat umat marah dan berpotensi menggerogoti iman. Namun, yang lebih membuat marah lagi adalah kenyataan bahwa Gereja bukannya berpihak dan memperhatikan para korban, tapi malah menutup-nutupi adanya tindak-tanduk pelecehan seksual itu. Bukannya ditindak menurut hukum Gereja atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib, para pelaku sering kali dibiarkan mempertahankan posisinya sebagai pastor atau pendidik, atau sekadar dipindahtugaskan sehingga tetap mempunyai akses untuk berhubungan dengan orang-orang yang berpotensi menjadi korbannya, yaitu orang-orang yang rentan, anak muda, dan anak-anak di bawah umur. Di sisi lain, para korban seringkali tidak dipercaya, atau ditekan agar tidak memublikasikannya, apalagi melaporkan ke polisi. Begitulah para korban diabaikan secara sistematis. Tidak mendengar (suara mereka yang menderita), tidak melihat (apa yang terjadi), berdiam diri/pembiaran (daripada membuka kejahatan), itulah sikap para penanggung jawab dalam Gereja, dalam ordo-ordo, dan dalam keuskupan-keuskupan sampai permulaan abad ini.

Kok Bisa?

Kok bisa itu terjadi? Ada pihak yang menyalahkan peraturan hidup selibat bahwa para imam Gereja Katolik tidak boleh menikah. Namun, sebagian pihak lain berpendapat bahwa selibat bukanlah pendorong utama adanya pelecehan. Cara hidup selibat memang

dapat menjadi faktor risiko, terlebih bagi yang secara emosional tidak dewasa. Oleh sebab itu, mereka yang mau menjadi imam atau mengikat diri dalam kaul keperawanan sebagai rohaniwan diperiksa betul-betul, juga secara psikologis, apakah secara emosional sudah memenuhi kapasitasnya. Dari hasil-hasil penelitian, diperkirakan yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur atau orang rentan jumlahnya sekitar empat persen dari seluruh imam Gereja Katolik. Ini artinya 96% imam lainnya tidak melakukannya, sehingga tidak perlu mencurigai semua imam dan uskup Katolik.

Apabila seorang imam atau rohaniwan mengalami kesulitan dengan selibat, masalahnya berbeda. Masalah utamanya bukan karena ia tidak dapat menguasai dorongan seksual, melainkan karena ia mengizinkan hubungan dengan seorang perempuan yang dekat berkembang sampai jatuh cinta, lalu barangkali juga melakukan hubungan seksual. Akhirnya, kalau ia tidak dapat mengakhiri hubungan ini dengan baik, ia harus melepaskan imamatnya atau kehidupannya membiara. Kalau itu terjadi, Gereja memang kehilangan seorang imam, tetapi itu bukan tanda bahwa secara psikologis ada yang tidak beres. Imam tersebut akhirnya akan dibebaskan dari keterikatan selibat oleh Dikasteri Imam di Vatikan. Banyak mantan imam, juga di Indonesia, kemudian membangun kehidupan berkeluarga yang bagus, menjadi anggota aktif Gereja dalam pelbagai fungsi, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Jadi, bukan cara hidup selibat yang membuat seseorang, dalam hal ini seorang imam, menjadi pelaku tindak pelecehan seksual. Sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat umum, para pelaku adalah mereka yang aktif secara seksual. Dengan demikian, pelecehan seksual terjadi karena pelaku tidak dapat menguasai nafsu seksualnya.

Yang sangat merisaukan adalah sikap Gereja yang sepertinya hanya berpikir tentang nama baiknya, sedangkan para korban tidak diperhatikan. Seakan-akan nama baik Gereja adalah yang paling penting, justru karena Gereja, dengan pimpinan para imam, uskup dan Paus, memaklumkan diri sebagai "kudus" – dalam syahadat para rasul: "Aku percaya akan Gereja yang kudus" – Gereja sepertinya tidak berani mengaku bahwa orang-orangnya, yang berkuasa di dalamnya juga ada yang melakukan kejahatan. Nama baik Gereja harus dilindungi, maka jangan suatu penyelewengan dan kejahatan sampai diketahui umum. Menurut Pater Hans

Zollner SJ, pemimpin *Centre for Child Protection* di Roma dan anggota Komisi Kepausan Demi Perlindungan Orang di Bawah Umur, "Kombinasi buruk antara kekerasan fisik, psikis, dan seksual selalu sudah ada dan di mana-mana." Merespons pertanyaan terkait mengapa kejadian-kejadian pelecehan begitu lama ditutup-tutupi di keuskupan-keuskupan Jerman (tentu sama saja di keuskupan-keuskupan lain), Zollner berpendapat, "Hal itu karena para uskup merasa takut bahwa mereka harus bertanggung jawab sendiri atasnya." Selain itu, dulu juga banyak umat masih memegang teguh pemikiran bahwa

gambaran suci Gereja harus dijaga sebisa mungkin, jangan sampai tercemar oleh kejahatan yang dilakukan beberapa anggotanya. Baru sekarang disadari bahwa mengutamakan nama baik dan mengabaikan para korban justru tindakan yang memalukan bagi Gereja. Sekarang sudah saatnya diambil sikap *no-tolerance* terhadap penyelewengan para aparat Gereja. Paus Fransiskus dengan tegas memimpin Gereja ke arah perubahan sikap: para korban harus diberi prioritas pertama.



Foto: fpw / Patung karya Hans
Koleksi Omah Petrock

Di sini perlu dicatat, pelecehan kiranya bukan hanya masalah dalam Gereja Katolik. Barangkali baru di Gereja Katolik masalah itu akhirnya disadari dan mulai ditindak. Masih banyak keuskupan yang tetap mengabaikan para korban demi nama baiknya sendiri. Masalah ini dapat diperkirakan ada di semua komunitas di mana suatu elite agama yang berkuasa secara naluri mati-matian menutup kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh personalnya. Struktur kekuasaan dalam agama-agama memiliki kemiripan satu sama lain. Ada yang bicara atas nama Tuhan, dan mereka ditaati secara buta. Para umat

sendiri tidak ingin mendengar kalau ada desas-desus tentang suatu penyelewengan, termasuk pelecehan yang dapat terjadi di asrama-asrama, atau dalam hubungan guru-murid atau di ruang belakang rumah ibadat. Ada naluri kuat bahwa nama baik para pemimpin rohani tidak boleh dipertanyakan. Akibatnya, korban justru menjadi korban untuk kedua kalinya karena masyarakat menganggapnya potensial mempermalukan pemimpin rohani. Sayangnya, hal ini tidak masuk dalam kesadaran sebagian besar masyarakat.



Ada naluri kuat bahwa nama baik para pemimpin rohani tidak boleh dipertanyakan. Akibatnya, korban sendiri, justru menjadi korban untuk kedua kalinya karena masyarakat menganggapnya potensial mempermalukan pemimpin rohani. Sayangnya, hal ini tidak masuk dalam kesadaran sebagian besar masyarakat.

Apa yang harus dilakukan?

Yang jelas, munculnya kasus-kasus pelecehan oleh para terdahis dalam institusi Gereja merupakan tantangan yang amat berat. Bahwa persentase imam dan rohaniwan yang melakukannya lebih sedikit daripada apa yang terjadi dalam masyarakat luas sedikit pun tidak mengurangi rasa malu yang mesti dirasakan oleh mereka yang bertanggung jawab dalam Gereja. Bukankah mereka dipanggil untuk memperkenalkan wajah Yesus Kristus kepada masyarakat, sehingga mereka mengklaim berhak memimpin umat, apalagi mereka mempromosikan suatu moralitas yang amat tegas? Banyak pembaca injil teringat kritik tajam Yesus terhadap elite rohani umat Yahudi, para farisi.

Dua Paus terakhir, Benediktus XVI dan Fransiskus sadar sepenuhnya bahwa yang harus diberi prioritas adalah para korban. Harus disediakan tempat di mana para korban pelecehan dapat mengadu dengan gampang, tanpa merasa malu, dengan membawa teman dan pembantu hukum, di mana mereka merasa dipercaya dan didukung. Di beberapa negara sudah terbentuk organisasi korban pelecehan dengan keras menyuarakan tuntutan mereka. Perlu selalu ada kompensasi dalam bentuk pembayaran yang jumlahnya tidak ditetapkan seandainya oleh uskup, melainkan oleh sebuah panitia yang sebisa mungkin juga bersama beberapa penyintas. Seandainya yang dilakukan oleh aparat Gereja merupakan perbuatan kriminal, misalnya pemerkosaan, polisi harus dilibatkan, si pelaku harus dibawa ke pengadilan.

Namun, perubahan sikap yang berpihak kepada para korban saja belum cukup. Gereja Katolik harus mengubah hierarkinya yang selama ini telah berjalan, yang ternyata kondusif untuk tindak pelecehan seksual, dan juga harus mengubah sikapnya yang selama ini menutup-nutupi adanya kasus-kasus tersebut. Paus Fransiskus juga menyebutkan bahwa Gereja perlu membongkar klerikalisme, yaitu sikap Gereja yang terlalu fokus pada klerus dan kelompok rohaniwan. Akibatnya, dalam Gereja Katolik, segala kuasa, baik rohani maupun organisatori, berada di tangan para klerus itu. Yang bukan klerus, umat biasa, dianggap seakan-akan hanya bagian pasif Gereja. Begitulah wawasan Gereja secara tradisional berfokus pada klerus dan rohaniwan. Padahal, seperti diingatkan dengan tegas oleh Konsili Vatikan II (1962-65), Gereja adalah umat Allah, keseluruhan umat yang dibaptis. Mereka semua

menerima Roh Allah. Menurut Vatikan II, Roh Ilahi, rasa tentang iman, berada pada seluruh umat Allah.

Kalau Gereja mau kembali setia pada panggilannya dan menjadi tempat di mana para korban merasa diberi hati dan penyembuhan, klerikalisme harus diobrak. Untuk itu, Paus Fransiskus mengajak seluruh Gereja, seluruh umat, untuk melibatkan diri dalam persiapan sinode – musyawarah besar – Gereja tahun 2024. Seluruh umat dapat berbicara, seluruh umat perlu didengarkan. Kalau pembaruan struktur kekuasaan Gereja dijalankan dengan sungguh-sungguh, tentu akan ada perubahan mendalam. Salah satu contoh dapat dilihat dalam jalan sinodal Gereja Jerman yang dimulai sejak tiga tahun lalu didorong oleh kemarahan umat atas munculnya kasus pelecehan dan sikap Gereja yang hanya menutup-nutupinya. Empat pertanyaan yang dibicarakan dalam jalan sinodal dapat membawa pembaruan yang tidak main-main. *Pertama*, apakah imam terus harus dibatasi pada laki-laki yang tidak menikah? *Kedua*, bukankah sudah waktunya mengubah tradisi dua ribu tahun bahwa hanya laki-laki yang boleh ditahbiskan menjadi diakon dan imam? *Ketiga*, bukankah umat pun perlu diikutsertakan dalam pemilihan uskup dan dalam penetapan kebijakan Gereja? *Keempat*, bagaimana fokus tradisional pada perkawinan dapat diperluas menjadi fokus pada hidup dalam bentuk hubungan-hubungan yang dimungkinkan sehingga kaum LGBT pun diberkati? Jelas, perubahan-perubahan amat mendalam ini tak dapat diputuskan sendiri oleh Gereja Jerman, melainkan harus diputuskan oleh seluruh Gereja. Namun, skandal pelecehan seksual oleh aparat Gereja menuntut perubahan-perubahan mendalam untuk kembali setia pada pengutusan Yesus.

Lalu bagaimana?

Tulisan ini mengenai Gereja Katolik. Penulis tidak akan menarik kesimpulan apa pun mengenai gereja-gereja, apalagi agama-agama lain. Namun, kiranya jelas, bahwa kebanyakan gereja, dan kebanyakan agama mempunyai struktur-struktur yang mirip dengan klerikalisme Katolik. Ada kasta pemimpin/ahli/imam/holy men (sangat jarang holy women) yang menikmati kepercayaan dan wewenang yang hampir mutlak dan “sabda”-nya wajib dituruti. Pelecehan yang dilakukan oleh hampir seperdua-puluh klerus Katolik bukan masalah agama, melainkan masalah psikologis, dan tentu saja, masalah kemanusiaan. Di satu pihak mereka menjadi

wakil Yang Mahasuci. Di lain pihak mereka manusia biasa, dengan kelemahan dan naluri manusia biasa. Bahwa mereka berwenang memberi bimbingan atas nama Tuhan tidak berarti bahwa mereka tidak bisa terpeleset secara seksual. Mereka lantas tidak bisa ke luar, malah menjadi pelaku terus-

menerus, karena "aparatus" menutup-nutupinya demi untuk melindungi nama baiknya. Sementara itu, para korban pelecehan menjadi korban sekali lagi.

Situasi seperti ini bisa terjadi dalam gereja dan agama mana pun di mana kekuasaan rohani menjadi mutlak, di mana para pemimpin mengatasnamakan – langsung atau tidak langsung – kemutlakan Tuhan, lalu membuat diri kebal terhadap sorotan kritis umat mereka. Kiranya tak ada agama yang boleh – secara apriori – menganggap bahwa "pada kami tak mungkin ada masalah seperti itu". Kiranya tetap akan ada klerus yang "berdosa", sebab mereka memang manusia. Tetapi apabila Gereja, dan segenap sosok agama, secara tegas berpihak pada korban daripada menutup-nutupinya, kasus-kasus pelecehan itu sendiri akan berkurang – seperti di negara Jerman di mana jumlah kasus dalam dua puluh tahun terakhir sangat berkurang – dan para korban akan merasa tertampung dalam Gereja, dan dalam agama mereka, daripada dibuang. Kalau Gereja Katolik mau dipercayai sebagai umat Tuhan, ia harus berada di pihak para korban. ●

Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno,
dosen STF Driyarkara, Jakarta.

